

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Radar Pekalongan

Wilayah: Kabupaten Batang

43 Ribu RTLH Masih jadi PR Pemkab Batang

<https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/07/30/278929/kuartal-dua-pad-kabupaten-pati-capai-49-persen>

BATANG – Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Batang ternyata masih cukup tinggi. Hingga menjelang akhir tahun 2021, tercatat masih tersisa 43 ribu RTLH yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

"Iya, berdasarkan data kami, masih ada 43 ribu RTLH yang tersebar di 15 kecamatan se Kabupaten Batang yang belum tersentuh bantuan rehabilitasi," ujar Kabid Perumahan dan Pertanahan DPRKP Kabupaten Batang, Mulyadi, baru-baru ini.

Ia mengatakan, masih banyaknya jumlah RTLH di Kabupaten Batang memang diakibatkan dari keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Di mana setiap tahun, pemerintah hanya bisa menganggarkan bantuan untuk 1-2 ribu unit RTLH saja.

"Kemampuan pemerintah untuk melakukan rehab RTLH setiap tahunnya hanya untuk 1-2 ribu unit saja. Jadi memang sulit untuk mengejar atau menyelesaikan puluhan ribu RTLH yang ada ini," ungkap Mulyadi.

Dijelaskan Mulyadi, ada beberapa sumber bantuan yang digelontorkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah RTLH ini. Beberapa di antaranya, yakni dari APBD Batang, Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jateng, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tahun 2021 ini, untuk APBD dialokasikan sebesar Rp 5,4 miliar, dengan sasaran 432 unit rumah. Di mana setiap rumah mendapat alokasi Rp12,5 juta. Untuk Banprov mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,48 miliar, yang diperuntukkan bagi 290 unit rumah. Adapun setiap rumah mendapat alokasi perbaikan Rp 12 juta.

Sedangkan untuk DAK dari pusat, tahun ini mendapat anggaran Rp2,3 miliar, untuk merenovasi 115 unit rumah, yang setiap rumahnya mendapat Rp 20 juta. Sedang dari BSPS dialokasikan untuk 211 unit RTLH. Selain dari keempat sumber bantuan itu, bantuan juga datang dari Corporate Social Re-sponsibility (CSR) milik PMI Batang, dengan total Rp 10 juta yang diperuntukkan bagi 15 unit rumah. "Jadi, uang bantuan itu akan ditransfer melalui kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk oleh kelompok penerima bantuan (KPB)," terang Mulyadi.

Ditambahkan Mulyadi, untuk mendapatkan bantuan RTLH itu harus ada pengajuan dari pemerintah desa. Kemudian nanti akan ada petugas dari DPRKP Batang yakni tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk mengecek ke lokasi. Petugas akan memverifikasi kelayakan RTLH yang diajukan oleh Pemerintah Desa. "Tahun ini sudah mendekati 1000 unit yang direhab. Yang paling banyak dari Kecamatan Warungasem, dan Kecamatan Batang," tukas Mulyadi.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Batang Wihaji mengatakan, bahwa Untuk mengentaskan puluhan RTLH itu, Pemkab Batang membutuhkan waktu hingga 50 tahun lamanya, dengan cara bertahap setiap tahunnya. "Setiap tahunnya pemkab hanya mampu melakukan perbaikan rata-rata seribu unit RTLH saja," ungkap Bupati Wihaji.

Bupati Wihaji menjelaskan, akibat keterbatasan yang ada, Pemkab Batang hanya mampu memperbaiki seribu unit. Sehingga jika dikalkulasi dengan jumlah yang ada, maka dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk memperbaiki semuanya.

"Kita inginnya setiap tahun jumlah RTLH yang diperbaiki bisa meningkat. Namun akibat keterbatasan anggaran, apalagi pada masa pandemi ini, anggaran yang ada tentunya sangatlah terbatas. Karena itulah, kami sangat berterimakasih pada pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam membantu perbaikan RTLH di Batang," tandas Bupati. **(fel)**